

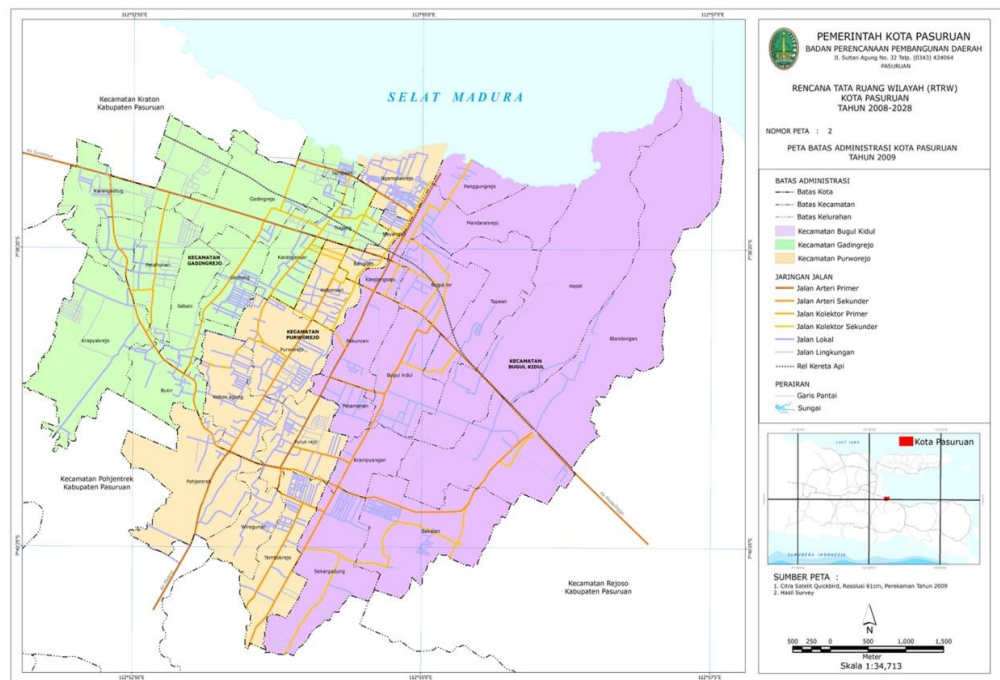
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan

1. Kondisi Geografis Kota Pasuruan

Kota Pasuruan termasuk kategori kota kecil luas sekitar 36,8 km² yang secara geografis terletak diantara 7⁰35' sampai 7⁰45' Lintang Selatan dan 112⁰45' sampai 112⁰55' Bujur Timur. Batas administrasi kewilayahan Kota Pasuruan di sebelah Utara dengan Selat Madura, sebelah Timur dengan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan dengan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2. Peta Wilayah Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2016

Kota Pasuruan terletak pada persimpangan jalan poros Surabaya- Probolinggo-Malang, dengan jarak 60 km ke Surabaya, 38 km ke Probolinggo dan 54 km ke Malang. Kondisi jalan dalam kota cukup baik dengan penyebaran yang merata di seluruh wilayah. Hubungan ke luar Jawa melalui laut terutama ke Kalimantan dan Sulawesi dapat dilakukan melalui pelabuhan. Pada saat ini Pelabuhan Kota Pasuruan memanfaatkan muara sungai Gembong sebagai pelabuhan perdagangan antar pulau dengan kegiatan utama untuk pelayaran rakyat (PELRA) seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Muara Sungai Gembong

Sebagai kota pelabuhan, Kota Pasuruan tidak hanya dilewati lalu lintas orang dan barang melalui darat, tapi juga melayani sirkulasi lalu lintas laut melalui Pelabuhan Pasuruan seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 4. Pelabuhan ini selain melayani penumpang dari Kota Pasuruan, pelabuhan ini juga melayani penumpang dari kota/daerah di sekitar di sekitar Kota

Pasuruan seperti Kabupaten Pasuruan, Kab/Kota Malang yang dikenal dengan sektor industrinya.



Gambar 4. Pelabuhan Kota Pasuruan

Topografis Kota Pasuruan berada pada ketinggian antara 0,0 – 10,0 meter dpl dengan rata-rata ketinggian pada 4,0 meter dpl dan kemiringan 0% - 1% melandai dari Selatan ke Utara, dan pada sebagian wilayah Utara terdapat cekungan yang sering menjadi penyebab terhambatnya aliran buangan air. Secara geologis, sebagian besar jenis batuan yang ada terdiri dari jenis alluvium dari campuran bahan endapan yang berasal dari daerah vulkanis intermedier pegunungan Tengger di sebelah Bukit Lipatan, dan batuan endapan berkapur rasi di sebelah Barat dan Timur. Jenis tanah didominasi tanah batuan yang bersifat intermedier sampai dengan basis. Kondisi tanah yang bertekstur liat yang dalam keadaan basah cenderung mengembang dan melekat, sedangkan dalam keadaan kering akan cenderung mengkerut serta membentuk celak dan bersifat cenderung keras.

Kadar Natrium dan Chlor yang tinggi sesuai pengembangan budidaya tambak dan produksi garam, terutama sepanjang garis pantai di bagian barat.

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Pasuruan mengenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau, namun tergolong cenderung kering (tipe D-2). Curah hujan rata-rata 1.337 mm per tahun dengan kecendrungan selama musim kemarau rata-rata 100 mm per bulan (Mei-November) dan selama musim penghujan rata-rata 200 mm per bulan (Januari-Maret).

2. Kondisi Demografis Kota Pasuruan

Kota Pasuruan pada saat ini memiliki empat kecamatan dan 34 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Pasuruan mencapai pada saat ini mencapai 20.028 jiwa (data sampai bulan Desember 2016). Komposisi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Pasuruan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
Kecamatan Purworejo	7	60.246 jiwa
Kecamatan Bugul Kidul	6	31.288 jiwa
Kecamatan Gadingrejo	8	46.489 jiwa
Kecamatan Panggungrejo	13	71.005 jiwa
Jumlah Penduduk		209.028 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Dari data Dinas Perikanan jumlah nelayan di Kota Pasuruan saat ini mencapai 2.090 orang. Tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, dan Kecamatan Panggungrejo.

Kelurahan Panggung Rejo juga merupakan bagian dari Kecamatan Bugul Kidul yang terdiri dari 4 RW yang dibagi menjadi 9 RT. Kelurahan

ini berbatasan langsung dengan Selat Madura disebelah Utara; Kelurahan Mandaranrejo disebelah Timur dan Selatan; dan Sungai Gembong disebelah Barat.

Sebagian besar lahan di Kelurahan Panggung Rejo adalah lahan terbangun yang digunakan kawasan perumahan dan permukiman, serta sebagian lainnya untuk pertambakan serta kawasan pantai yang digunakan untuk pembuatan garam. Kehidupan sosial yang ada bercirikan sebagaimana umumnya masyarakat pantai, yang mengandalkan pencaharian pada hasil melaut sebagai nelayan, buruh / awak kapal nelayan, atau buruh pekerjaan pembuatan / pemeliharaan kapal. Kondisi masyarakat yang ada cukup heterogen namun masyarakat umumnya tidak memiliki ketrampilan kerja pada bidang lainnya. Alternatif jenis kegiatan yang menjadi sumber pendapatan antara lain pedagang kecil (peracangan) atau pekerjaan formal pada lembaga pemerintah atau non-pemerintah lainnya.

Kegiatan sektor perikanan laut maupun kegiatan berbasis produktifitas perairan laut (*perkapalan, nelayan/awak kapal, petani garam, dll*) mengalami perkembangan relatif moderat dan lambat, bahkan cenderung mengalami pergeseran ke *sektor industri pengolahan hasil laut*. Upaya pengembangan yang difasilitasi pemerintah masih relatif terbatas pada *aspek normatif (pembangunan dermaga dengan TPI, pengembangan koperasi, bina daya masyarakat nelayan, dll)*, yang umumnya tidak fokus pada upaya strategis penanggulangan kesulitan ekonomi dalam skala lokal.

Masyarakat Kota Pasuruan tergolong heterogen terdiri dari beragam etnis. Empat etnis yang mendominasi adalah Jawa, Madura, Tionghoa dan Arab. Etnis Madura lebih banyak tinggal di wilayah utara Kota Pasuruan, sedangkan tiga etnis lainnya tersebar di bagian tengah perkotaan. Heterogenitas masyarakatnya tidak lepas dari keberadaan pelabuhan yang menarik minat orang untuk datang dan kemudian tinggal di Kota Pasuruan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Meskipun terdiri dari multi etnis, namun hubungan masing-masing orang berjalan harmonis.

Budaya masyarakat Kota Pasuruan demikian tinggi mengenai norma dan nilai sebagai satu kesatuan dalam pikiran masyarakat yang memberikan rasa harga diri dan martabat dari pribadi masing-masing. Norma dan nilai yang terkandung pada masyarakat Kota Pasuruan dapat dikategorikan melalui beberapa aspek, yaitu:

1) Ideologi

Dengan adanya norma agama yang relatif tinggi (khususnya agama Islam) di Kota Pasuruan, membuat namanya dikenal sebagai Kota Santri Pasuruan, hal itu tercermin dengan keberadaan pondok pesantren yang relatif banyak. Dengan tingginya penerapan nilai dan norma yang ada di Kota Pasuruan membuat segala bentuk kegiatan yang akan direncanakan atau yang akan dilakukan oleh berbagai pihak harus selalu patuh terhadap norma dan nilai yang berlaku di Kota Pasuruan.

2) Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kota Pasuruan dapat dilihat dari mayoritas penduduk Kota Pasuruan yang bekerja di bidang perdagangan, bidang-bidang lain yang menjadi profesi di Kota Pasuruan adalah bidang industri mebel kayu rumahan, bidang nelayan, bidang pertanian dan bidang perkantoran.

3) Politik

Kota Pasuruan memiliki 12 partai politik, yang mayoritasnya berasal dari partai politik PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Partai Demokrat.

4) Sosial Budaya

Kota Pasuruan memiliki keadaan sosial yang dapat dikatakan tentram, dimana setiap tahunnya di Kota Pasuruan melakukan giat keagamaan seperti acara peringatan maulid nabi, kegiatan pengajian dan Khotmil Quran rutin pada saat bulan ramadhan. Lalu kegiatan islami lainnya seperti adanya peringatan Haul KH. Abdul Hamid, Haul Mbah Slagah, dan Haul Habib Ja'far. Selain kegiatan keagamaan, masyarakat Kota Pasuruan memiliki budaya yang unik yaitu tradisi petik laut dan rangkaian hari jadi Kota Pasuruan yang bertepatan setiap tanggal 8 Februari.

3. Perekonomian Kota Pasuruan

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan angka produk domestik regional bruto, investasi, inflasi, pajak, dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besarnya nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai bruto yang dihasilkan unit-unit

produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai produk domestik bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat tercermin oleh pertumbuhan nilai produk domestik regional bruto.

Pada tabel 4 disajikan trend perkembangan perekonomian Kota Pasuruan selama 2003-2008 yang menunjukkan pertumbuhan moderat sampai periode 2004 dan mengalami lonjakan pertumbuhan signifikan pada tiga tahun berikutnya (2005 dan 2006 pada perhitungan atas dasar harga konstan) untuk kemudian kembali stabil pada 2007 dan 2008.

Tabel 4. Trend Perkembangan Perekonomian Kota Pasuruan Selama 2003-2008

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PDRB (Rp. 000)						
-ADHB	997,519	1,124,352	1,196,525	1,592,083	1,826,051	2,130,919
Trend Pertumbuhan (%)	11,98%	12,71%	6,42%	33,06%	14,70%	16,70%
-ADHK	309,989	326,102	542,348	905,174	954,629	1,004,399
Trend Pertumbuhan (%)	4,13%	5,20%	66,31%	66,90%	5,46%	5,21%
Income per kapita (Rp 000)						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
-ADHB	5,119	5,706	6,011	7,918	8,993	10,392
Trend Pertumbuhan (%)	10,73%	11,47%	5,35%	31,74%	13,57%	15,56%
-ADHK	1,590	1,652	2,725	4,494	4,693	4,890

Trend Pertumbuhan (%)	3,11%	3,92%	64,93%	64,96%	4,43%	4,19%
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,13%	5,20%	66,31%	66,90%	5,46%	5,21%

Sumber: Diolah kembali dari RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2006-2010, PJM Pronangkis Kota Pasuruan 2007-2009 dan Kota Pasuruan Dalam Angka 2009

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami lonjakan signifikan pada 2005 dan 2006, masing-masing sebesar 66,31% dan 66,90% dari tahun sebelumnya. Meski pada tahun berikutnya angka pertumbuhan mengalami penurunan drastis (lebih dari 50%), namun pada prinsipnya tetap menunjukkan adanya pertumbuhan. Pada tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,46% dan pada tahun 2008 masih terjadi pertumbuhan sebesar 5,21%.

Fluktuasi pertumbuhan yang sedemikian besar pada dasarnya dipengaruhi oleh trend kontribusi potensi ekonomi sektoral, yang pada periode 2005 dan 2006 mengalami kenaikan nilai secara signifikan. Potensi tersebut antara lain dari sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi. Namun demikian, pertumbuhan yang sangat tinggi dalam dua tahun menunjukkan percepatan capaian titik jenuh, sehingga meskipun pada tahun berikutnya masih menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi namun angka pertumbuhannya jauh dibawah angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

4. Gambaran Umum Kehidupan Nelayan Kota Pasuruan

Kota Pasuruan memiliki beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian seperti adanya perusahaan

mebel yang terletak di Kelurahan Bukir, tambak ikan dan udang yang ada di wilayah pelabuhan utara, hasil laut yang ada di perairan wilayah utara, galian pasir di sekitar pesisir Kota Pasuruan. Kehidupan sosial yang ada bercirikan sebagaimana umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai mengandalkan pencaharian pada hasil laut, dimana Kota Pasuruan memiliki wilayah pesisir yang secara otomatis masyarakat yang tinggal di pesisir pantai menjadi nelayan.

5. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Kota Pasuruan

Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
4. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan.
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

b. Tugas Pokok Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Fungsi Sekretariat untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan, maka sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja subbagian;
2. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
3. Melaksanakan penyusunan program;
4. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian.
- i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan.
- j. Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai.
- k. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai.
- m. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis produksi, sarana dan prasarana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan produksi sarana dan prasana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan produksi sarana dan prasarana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH, dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Produksi Sarana dan Prasarana TPH mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;

- b. Menyiapkan pembinaan petani dan petugas tentang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Menyusun rencana kebutuhan benih produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melaksanakan pendampingan teknis dan fasilitasi usaha pemberdayaan kelompok/buruh tani dalam pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar baik yang berupa institusi pemerintah, swasta, dan petani;
- g. Melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija.
- h. Menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasional dalam pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija.
- i. Menyusun rencana teknis pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija.
- j. Melaksanakan identifikasi sarana teknologi budidaya.
- k. Menyusun rencana kebutuhan sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) serta melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta penerapannya.
- l. Menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan);

- m. Melaksanakan inovasi teknologi pertanian pendukung optimalisasi sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- n. Melaksanakan pengujian kesuburan lahan pertanian;
- o. Menyiapkan fasilitasi pengembangan pupuk dan pestisida organik;
- p. Melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi, dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Budidaya dan Perlindungan TPH mempunyai tugas

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan pembinaan dan bimbingan pengelolaan tata guna air dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- c. Menyiapkan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.

B. Penyajian Data

1. Strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan
 - a. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Sumberdaya Laut

Kawasan perikanan tangkap, terdapat di seluruh kawasan perairan laut Kota dan Kabupaten Pasuruan yang merupakan area yang dirancang

untuk mengakomodasi dan menjamin akses yang kontinyu pada sumberdaya ikan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang permanen maupun setengah permanen dan struktur budidaya laut.

Pengembangan dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Namun sampai saat ini pengembangan dan pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Iskandar selaku kepala bidang budidaya perikanan di Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan sebagai berikut:

“Wilayah pesisir Kota Pasuruan sepanjang kurang lebih 48 km menjadi sumber penggerak perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di empat wilayah pesisir Kota Pasuruan. Potensi cadangan lestari perikanan laut di Kota Pasuruan sebesar 46.321,76 ton per tahun yang terdiri dari potensi cadangan lestari ikan pelagis sebesar 26.370,83 ton per tahun” (hasil wawancara hari Senin 21 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Hal ini dikatakan senada oleh Ibu Ir Nur Badiah selaku kepala seksi budidaya perikanan sebagai berikut:

“Potensi cadangan lestari tersebut menurun sangat besar dibandingkan tahun 1979 yaitu sebesar 89.365,26 ton per tahun. Dengan demikian potensi cadangan tersebut mengalami penurunan rata-rata 3% per tahun” (hasil wawancara hari Senin 21 Agustus 2017, pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Hal ini didukung dengan data yang tertuang dalam rencana strategis jangka pendek Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan sebagai berikut:

“Terdapat dua strategi yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan keuntungan nelayan jangka panjang dan mencegah penangkapan yang berlebihan serta terkurasnya sumberdaya ikan di perairan laut Kota Pasuruan yaitu kebijakan pembangunan penangkapan (ekspansi) dengan menambah jumlah armada atau unit alat tangkap untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan lebih tangkap (*over exploited*). Kebijakan pengendalian tangkap secara langsung membatasi kegiatan usaha nelayan dan harus disadari bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari hasil utama kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu upaya tersebut memerlukan pendekatan kehati-hatian (*precautionay approach*). (sumber: Rencana Strategis Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan, 2017).

Perikanan pelagias, *demersal dan crustacea* di perairan laut Kota Pasuruan sudah berada pada status *over exploited* atau bahkan sudah terdepleksi (terancam tidak bisa dieksploitasi). Oleh karena itu, strategi kebijakan dalam rangka perbaikan pemanfaatan usaha penangkapan ikan yang akan diambil adalah pengendalian perikanan tangkap dengan cara membatasi usaha penangkapan.

Dalam rangka pemulihan stok cadangan ikan untuk perikanan tangkap berkelanjutan, maka ditindaklanjuti yang akan diambil dalam lima tahun kedepan antara lain adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tentang pentingnya menjaga sumberdaya ikan agar lestari, melakukan pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi stok cadangan ikan,

bersama-sama masyarakat mengalokasikan area cadangan untuk percadangan kawasan konservasi, melakukan rehabilitasi terumbu karang dan melakukan pemasangan terumbu karang buatan serta aplikasi teknologi pengkayaan sumberdaya ikan di laut.

Mengenai pengembangan perikanan yang berkelanjutan Kota Pasuruan terdapat upaya yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Iskandar selaku kepala bidang budidaya perikanan di Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan sebagai berikut:

“Kawasan pantai di Kota Pasuruan secara umum telah dimanfaatkan secara maksimal bahkan beberapa tahun lalu yang cenderung melebihi batas daya dukung lingkungan, sehingga menimbulkan berbagai kendala. Hal tersebut menyebabkan kegiatan budidaya ikan atau udang di tambak belum dapat memberikan hasil yang optimal. Usaha budidaya di tambak saat ini mencapai luasan 4.604,69 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Kegagalan usaha budidaya udang beberapa dekade ini selain karena faktor lingkungan juga diakibatkan semakin sulitnya untuk mendapatkan benih dan induk udang yang berkualitas baik. Selain itu berjangkitnya beberapa penyakit dan serangan hama juga semakin memperparah keadaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan upaya untuk mencari solusi guna mengatasi serangan penyakit” (hasil wawancara hari Senin 21 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Komoditi budidaya tambak selain udang seperti bandeng masih dapat bertahan. Oleh karena itu, banyak pembudidaya tambak yang beralih ke budidaya bandeng atau melakukan mix culture. Hal ini dilakukan untuk mensiasati kendala penurunan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kegagalan budidaya udang windu. Kemudian ditambahkan oleh Ibu Ir Nur Badiah selaku kepala seksi budidaya perikanan yang menyatakan bahwa:

“Usaha garam juga menguntungkan di Kota Pasuruan dimana potensi tambak garam dari hasil pemetaan tahun 2016 sebesar 803,45 Ha yang berada di Kecamatan dengan jumlah petani garam sebanyak 204 orang dengan lahan produksi seluas 244,73 Ha dan jumlah produksi garam 8.096 ton. Saat ini pemerintah pusat juga sedang berupaya untuk mengembangkan usaha garam rakyat melalui program pemberdayaan usaha garam dan menuju swasembada garam nasional” (hasil wawancara hari Senin 21 Agustus 2017, pukul 13.30 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Mengingat usaha pengolahan garam rakyat sangat dipengaruhi oleh cuaca maka perlu adanya intensifikasi usaha garam melalui paket teknologi yang lebih produktif seperti teknologi saluran ulir dan sistem terpal. Dengan pemakaian kedua teknologi tersebut diharapkan waktu pembuatan garam menjadi lebih singkat dengan kualitas baik sehingga dapat memaksimalkan pengaruh cuaca yang kadang perubahannya tidak menentu. Menjamin kebutuhan konsumsi garam dan pemasaran garam rakyat maka dikembangkan Unit Pengolah Garam (UPG) yang dikelola oleh kelompok yang mengolah garam krosok menjadi garam konsumsi yang dikemas dan siap dipasarkan. Untuk proses pengelolaan dapat kita lihat seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses Pengelolaan Garam

Kondisi wilayah pesisir Kota Pasuruan selain terdapat tambak air payau terdapat juga kawasan hutan bakau (*mangrove*) seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 6, yang berfungsi sebagai daerah penyangga dengan kondisi yang berbeda-beda disetiap lokasinya. Pemulihan sumberdaya *mangrove* melalui penanaman kembali sudah berjalan dengan baik walaupun dalam pengelolaanya masih belum optimal. Berkenaan dengan budidaya ikan di air tawar Bapak Setyobudi A, Pi selaku kepala seksi Sarana Prasarana Budidaya Perikanan menyatakan sebagai berikut:

“Budidaya ikan di air tawar atau kolam sudah mulai berkembang, sampai sekarang luas kolam ikan telah mencapai kurang lebih 48,71 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila, gurami. Akhir-akhir ini mulai dikembangkan jenis ikan patin dan bawal tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dengan teknologi budidaya yang relatif mudah. Udang galah juga merupakan alternatif komoditas budidaya dan sudah menjalin pola kemitraan dengan pengusaha restoran tetapi dalam perkembangannya masih menemui kendala dalam mendapatkan benihnya” (hasil wawancara hari

Selasa 22 Agustus 2017, pukul 10.15 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).



Gambar 6. Kawasan Hutan Bakau (*Mangrove*)

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan di beberapa tempat mulai banyak terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih pembudidaya ikan. Namun demikian benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik dalam daerah maupun di luar daerah. Diversifikasi usaha juga telah dilakukan oleh pembudidaya ikan yaitu mengembangkan budidaya berbagai jenis ikan hias. Pada dasarnya perairan umum belum

dimanfaatkan untuk budidaya perikanan secara optimum. Luas budidaya di karamba jaring apung saat ini mencapai 4,1 Ha. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah nila, patin dan bawal. Hasil yang diperoleh pembudidaya ikan karamba dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Saat ini penambahan unit karamba jaring apung dikendalikan dengan cukup ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan sebagai tempat pariwisata maupun kegiatan usaha perikanan, sehingga kepada para pembudidaya ikan karamba jaring disarankan untuk melakukan intensifikasi usaha dan diversifikasi komoditi sebagai langkah peningkatan usahanya. (sumber: Dokumen Program Pengembangan Perikanan Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan, 2017).

Usaha budidaya ikan di laut diarahkan pada aplikasi teknologi terapan untuk beberapa komoditi yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai potensi yang ada. Namun sampai sekarang pengembangan budidaya ikan di laut masih menjumpai beberapa kendala, diantaranya faktor keamanan. Usaha pengolahan ikan yang terdapat di wilayah Kota Pasuruan terdiri dari usaha pengolahan ikan tradisional sebanyak kurang lebih 1.411 RTP, pedagang ikan sebanyak kurang lebih 701 RTP, pedagang non konsumsi kurang lebih 42 RTP dan modern sebanyak 26 unit perusahaan. Hasil pengolahan ikan tradisional meliputi pemindangan, pengeringan atau pengasinana, pengasapan, pembuatan terasi, pengesan. Sedangkan unit usaha

pengolahan yang modern meliputi pengalengan, pembekuan (*coldstorage*), pembuatan krupuk ikan atau udang dan *frozen foods*. (sumber: Dokumen Program Pengembangan Perikanan Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan, 2017).

b. Pemberdayaan Nelayan

Konsep penataan kawasan permukiman nelayan Kota Pasuruan sebagai dampak pengembangan Kota Pasuruan, hasil analisis memperlihatkan kondisi sosial dan ekonomi nelayan Purworejo, Bugul Kidul, Gadingrejo, Pangggungrejo masih mengalami ketinggalan, serta terdapat kendala permodalan, pengolahan dan pemasaran ikan yang mengindikasikan pengaruh positif kekuatan-kekuatan dinamis Kota Pasuruan tidak maksimal di kawasan ini. Konsep penataan yang perlu dilakukan adalah melalui revitalisasi usaha perikanan sebagai pengembangan ekonomi mandiri dan penataan prasarana dan sarana dasar permukiman. Temuan dari penelitian adalah terdapat aspek sosial dan ekonomi yang menjadi indikator kekuatan-kekuatan dinamis Kota Pasuruan belum sepenuhnya mampu memberi pengaruh positif yang maksimal pada kawasan permukiman nelayan yang merupakan nelayan pekerjaan sebagian besar nelayan pekerja yang merupakan nelayan, penghasilan sebagian besar berpendapatan di bawah UMK Kota Pasuruan, modal kerja lebih banyak yang memanfaatkan pinjaman dari tengkulak daripada kredit bank, pemasaran hasil sebagian besar menjual langsung kepada tengkulak, pengobatan, dipuskesmas pembantu dan bidan

desa/kelurahan, tempat belanja kebutuhan kerja di lingkungan pesisir Kota Pasuruan dan mendapatkan harga dan kualitas barang yang tidak yang tidak bersaing, dan pendidikan di lingkungan pesisir Kota Pasuruan yang merupakan pendidikan rendah.

Luas perairan Kota Pasuruan adalah 19.536,02 km² atau 76% dari luas wilayah keseluruhan, mengandung berbagai sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis penting. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan *standing stock* perikanan sebesar 89.865,69 ton/tahun, potensi lestari maximum sustainable yield (msy) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebesar 26.946,41 ton/tahun. Perikanan di Kota Pasuruan merupakan daerah sebaran jenis ikan pelagis dan komersial yang mempunyai nilai ekonomis penting. (sumber: Rencana Strategis Jangka Pendek Kota Pasuruan, 2017).

Kekayaan sumberdaya ikan di Kota Pasuruan tersebut, masyarakat pesisir mayoritas menjadi nelayan. Pendapatan kotor nelayan dari hasil melaut sebesar Rp 75.000 hingga 100.000 per hari. Setelah pendapat tersebut dikurangi total biaya operasional, sisanya dibagi dua antara pemilik perahu dengan buruh nelayan. Rata-rata biaya operasional per hari Rp 35.000 sehingga rata-rata pendapatan bersih untuk nelayan maupun untuk buruh nelayan per hari sebesar kurang lebih Rp. 40.000. Tingkat pendidikan merupakan suatu gambaran secara umum untuk melihat kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada umumnya masyarakat pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi

rendah dan relatif sederhana. Pendidikan formal yang diterima masyarakat pesisir secara umum jauh lebih rendah dari pendidikan masyarakat non pantai lainnya.

Pemberdayaan masyarakat nelayan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan secara umum dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan internal secara sinergis akan menentukan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), kemudian lingkungan eksternal secara sinergis akan menentukan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang akan dihadapi masyarakat nelayan.

Hasil analisis situasi dengan pendekatan secara komprehensif dari berbagai aspek yang berpengaruh penting terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal strategis (peluang dan ancaman), berdasarkan hasil survei, diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari lingkungan masyarakat nelayan yakni:

Tabel 5. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor internal	Kekuatan:	Kelemahan:
	1. potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar 2. semangat kerja tinggi 3. tegar dalam	1. keterampilan dan penguasaan teknologi masih kurang 2. jiwa enterpreneur rendah. Posisi tawar terhadap

	menghadapi kesulitan hidup	pedagang pengepul rendah.
Faktor eksternal	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permintaan hasil produksi ikan tinggi 2. tersedianya fasilitas kredit bagi nelayan 3. lokasi penangkapan (fishing ground) dekat dan luas 4. tenaga kerja murah 5. kualitas perairan yang cukup baik. 	<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif 2. harga pasar ditentukan oleh pihak pengepul 3. harga BBM tinggi 4. penangkapan ikan tergantung musim 5. hasil produksi berfluktuasi

Perumusan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan menggunakan analisis SWOT dengan berdasarkan pada faktor-faktor lingkungan strategis. Alternatif-alternatif strategi yang merupakan rumusan rencana strategi (renstra) pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Hasil generating dari matriks SWOT disampaikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi pemberdayaan nelayan Kota Pasuruan

S	SO	WO
T R A T E	<ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi fasilitas kredit yang lebih intensif terhadap nelayan. 2. intervensi pasar (membuka peluang pasar) oleh pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengenalan teknologi tepat guna kepada nelayan. 2. pengembangan diversifikasi usaha pengolahan ikan

G	dan instansi terkait.	
I	ST 1. mengembangkan pengalaman laut oleh aparat keamanan. 2. deregulasi distribusi BBM khusus untuk nelayan.	WT 1. subsidi harga BBM bagi nelayan. 2. regulasi untuk mencegah penangkapan ikan destruktif melalui aturan adat.

Hasil analisis strategi pemberdayaan nelayan dapat terumuskan strategi pemberdayaan nelayan. Kemudian dirumuskan beberapa program strategis untuk penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan peran kelembagaan, peningkatan produktivitas nelayan, konservasi sumberdaya ikan.

Peningkatan produktivitas nelayan dapat diketahui melalui sumberdaya perikanan yang ada di Kota Pasuruan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Dini Firdaus Fera Mustika, S. Pi selaku kepala seksi pemberdayaan nelayan sebagai berikut:

Sumberdaya perikanan yang ada di Kota Pasuruan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekitarnya. Hasil identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan nelayan antara lain nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan skala kecil, selain itu pengetahuan keterampilan juga masih terbatas. Khusus untuk buruh nelayan ditemukan bahwa nelayan belum mampu membeli perahu dan peralatan tangkap sendiri. Salah satu penyebab adalah akses terhadap lembaga keuangan seperti bank sangat rendah padahal hampir sebagian besar tangkap di Indonesia didominasi

oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Senada dengan yang Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) diuraikan bahwa:

menunjukkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2006 mencapai hampir 49 juta unit dari angka tersebut 13% yang mampu mengakses perbankan sedangkan 49,8% mengandalkan modal sendiri. (sumber BPS Kota Pasuruan, 2017)

Persoalan yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian pinjaman adalah kepercayaan lembaga-lembaga keuangan seperti bank kepada masyarakat kecil sangat rendah, karena selama ini fasilitas pinjaman pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas dan juga banyak fakta terjadi kegagalan pengembalian pinjaman yang diberikan bagi masyarakat kecil, oleh karena itu pembinaan adalah kata kunci, membangun pemberdayaan masyarakat adalah cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat.

Program-program prioritas dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan antara lain kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan, membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan, dan optimalisasi fungsi dan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan. Ibu Dini Firdaus Fera Mustika, S. Pi selaku kepala seksi pemberdayaan nelayan menyatakan bahwa:

“Pemberian kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan merupakan prioritas program dalam upaya pemberdayaan nelayan. Secara

umum, jumlah pendapatan nelayan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang besar. Diketahui pendapatan Rp.900.000 perbulan sedangkan pengeluaran sebesar Rp.700.000 per bulan sehingga masih terdapat selisih pendapatan sebesar Rp. 200.000 per bulan. Pendapatan bersih Rp.200.000, tidak semua nelayan memiliki tabungan di bank maupun lembaga keuangan mikro yang ada di lingkungan sekitar nelayan” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan)”

Oleh karena itu, selisih pendapatan tersebut memiliki nilai tambah yang optimal, maka program utama yang perlu dilaksanakan adalah memberikan kredit khususnya kepada para buruh nelayan agar memiliki kapal sendiri, sehingga selisih pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mengansur pembayarannya. Selain itu memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada para nelayan agar mau membuka rekening tabungan agar selisih pendapatan tersebut lebih aman dan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bunga terhadap masyarakat nelayan. Dengan demikian, diharapkan produktivitas nelayan bisa meningkat.

Peningkatan peran kelembagaan lokal untuk pemberdayaan nelayan, maka terdapat dua prioritas program yang dilaksanakan yaitu membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan dan kedua adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan. Sudah terdapat kelompok usaha bersama yang lahir dari nelayan sendiri. Seperti hasil dari tangkapan nelayan lalu istri dari nelayan melakukan pengelolaan ikan hasil tangkap dengan cara pengasinan seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Proses Pengasinan Ikan Hasil Tangkap Nelayan

Hubungan kerja yang terjadi saat ini adalah hubungan antara atasan dengan bawahan atau pemilik perahu dengan buruh nelayan yang dengan sistem bagi hasil. Penghasilan yang diperoleh ketika buruh nelayan melaut, ketika buruh nelayan tidak melaut maka pemilik perahu tidak mendapatkan penghasilan.

Membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan merupakan upaya yang paling realistis bagi istri-istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Melakukan usaha bersama merupakan pekerjaan untuk membantu menambah penghasilan keluarga nelayan, akan tetapi pekerjaan mengurus keluarga tetap menjadi prioritas utama dalam rumah tangga. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan secara berkelompok antara lain mengolah pangan dengan bahan dasar ikan.

Memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan kepada para anggota kelompok merupakan pemberian modal yang sangat penting

dalam melakukan kegiatan usaha. Sebab modal dalam melakukan usaha tidak hanya dalam bentuk uang semata, tetapi harus diberikan keterampilan mengenai jenis usaha yang akan nelayan lakukan. Tanpa adanya keterampilan dari masing-masing anggota kelompok, maka kegiatan usaha yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Adapun jenis pelatihan yang akan diberikan sangat tergantung pada minat dari masing-masing anggota dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada disekitar tempat tinggal nelayan.

c. Pengawasan dan Pengendalian Secara Periodik terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan menjadi upaya konservasi sumberdaya ikan, terdapat empat alternatif strategi pemberdayaan nelayan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dini Mariati S. Pi selaku kepala seksi pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap sebagai berikut:

“pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan menjadi upaya konservasi sumberdaya ikan, terdapat empat alternatif strategi pemberdayaan nelayan yakni pembangunan pos jaga, melakukan patroli rutin, menambah armada patrol pengamanan laut, dan melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.30 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Disamping hal tersebut, memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan Kota Pasuruan secara optimal,

mengajak masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan dan kelautan untuk bersama-sama mengoptimalkan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kota Pasuruan. Senada dengan yang diuraikan oleh Ibu Dini Firdaus Fera Mustika, S. Pi selaku kepala seksi pemberdayaan nelayan menyatakan bahwa:

“Memberikan informasi tentang tata cara pengurusan perijinan usaha penangkapan, memberikan informasi tentang Undang-undang beserta sanksi yang berkenaan dengan usaha perikanan serta memberikan informasi tentang kewenangan wilayah serta jalur-jalur penangkapan ikan” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi sosialisasi mengenai pengelolaan sumberdaya laut maupun mengenai konservasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan nelayan ikut berpartisipasi dalam menjaga sumberdaya laut disamping melakukan aktivitas menjadi nelayan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Faktor internal yang mempengaruhi strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dini Firdaus Fera Mustika, S. Pi selaku kepala seksi pemberdayaan nelayan sebagai berikut:

“dilihat dari pertumbuhan penduduk wilayah pesisir yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang beragam, hanya mengandalkan pekerjaan melaut atau mencari ikan sehingga tidak mendapatkan pendapatan yang banyak karena bergantung pada alam atau hasil melaut. Kedua kualitas sumberdaya manusia dimana merupakan nelayan yang rata-rata memiliki pendidikan rendah, hanya memiliki pola pikir bahwa

mencari pekerjaan untuk makan sehari-hari tanpa adanya niat untuk menabung atau mencari alternatif pekerjaan dalam memanfaatkan hasil olahan laut yang beragam. Ketiga modal usaha yang dimiliki oleh nelayan tidak besar dimana antara nelayan dan buruh nelayan membagi hasil laut, baik nelayan maupun buruh laut mendapatkan pendapatan kecil sekitar Rp. 10.000 per hari” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Faktor eksternal yang mempengaruhi strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dinyatakan oleh Ibu Dini Mariati S. Pi selaku kepala seksi pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap sebagai berikut:

“dominasi pengelolaan ikan atau proses produksi oleh tengkulak dimana diketahui proses produksi yang dilakukan oleh tengkulak lebih besar karena pemasaran hingga keluar kota dilakukan oleh tengkulak, dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopsoni” (hasil wawancara hari Rabu 23 Agustus 2017, pukul 14.30 WIB di Kantor Dinas Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Faktor internal pertumbuhan penduduk wilayah yang cepat tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sumberdaya manusia dari nelayan rendah, minimnya modal usaha nelayan. Dari faktor eksternal sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok tertentu dimana tengkulak mendominasi pemasaran hingga keluar kota.

C. Pembahasan

1. Strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

a. Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Sumberdaya Laut

Di Indonesia terdapat potensi pengembangan untuk perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan.

Kota Pasuruan terletak pada persimpangan jalan poros Surabaya-Probolinggo-Malang, dengan jarak 60 km ke Surabaya, 38 km ke Probolinggo dan 54 km ke Malang. Kondisi jalan dalam kota cukup baik dengan penyebaran yang merata di seluruh wilayah. Hubungan ke luar Jawa melalui laut terutama ke Kalimantan dan Sulawesi dapat dilakukan melalui pelabuhan. Pada saat ini Pelabuhan Kota Pasuruan memanfaatkan muara sungai Gembong sebagai pelabuhan perdagangan

antar pulau dengan kegiatan utama untuk pelayaran rakyat (PELRA). Terdapat juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pasuruan yang terletak di dekat Pelabuhan Kota Pasuruan seperti yang dapat kita lihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Tempat Pelelangan Ikan Kota Pasuruan

Wilayah pesisir Kota Pasuruan sepanjang kurang lebih 48 km menjadi sumber penggerak perekonomian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di empat wilayah pesisir Kota Pasuruan. Pengembangan dan pelestarian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pengelolaan dan teknik penanganan yang tepat. Namun sampai saat ini pengembangan dan pelestarian potensi yang ada tersebut belum dilakukan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.

Potensi cadangan lestari perikanan laut di Kota Pasuruan sebesar 46.321,76 ton per tahun yang terdiri dari potensi cadangan lestari ikan pelagis sebesar 26.370,83 ton per tahun. Potensi cadangan lestari tersebut

menurun sangat besar dibandingkan tahun 1979 yaitu sebesar 89.365,26 ton per tahun. Dengan demikian potensi cadangan tersebut mengalami penurunan rata-rata 3% per tahun.

Terdapat dua strategi yang dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan dalam upaya memaksimalkan keuntungan nelayan jangka panjang dan mencegah penangkapan yang berlebihan serta terkurasnya sumberdaya ikan di perairan laut Kota Pasuruan yaitu kebijakan pembangunan penangkapan (ekspansi) dengan menambah jumlah armada atau unit alat tangkap untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan lebih tangkap (*over exploited*). Kebijakan pengendalian tangkap secara langsung membatasi kegiatan usaha nelayan dan harus disadari bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari hasil utama kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu upaya tersebut memerlukan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*).

Perikanan *pelagias*, *demersal* dan *crustacea* di perairan laut Kota Pasuruan sudah berada pada status *over exploited* atau bahkan sudah terdepleksi (terancam tidak bisa dieksploitasi). Oleh karena itu, strategi kebijakan dalam rangka perbaikan pemanfaatan usaha penangkapan ikan yang akan diambil adalah pengendalian perikanan tangkap dengan cara membatasi usaha penangkapan. Dalam rangka pemulihan stok cadangan ikan untuk perikanan tangkap berkelanjutan, maka ditindaklanjuti yang akan diambil dalam lima tahun kedepan antara lain adalah melakukan

pembinaan terhadap masyarakat perikanan tentang pentingnya menjaga sumberdaya ikan agar lestari, melakukan pengaturan jumlah dan jenis alat tangkap yang boleh dioperasikan dengan mempertimbangkan kondisi stok cadangan ikan, bersama-sama masyarakat mengalokasikan area cadangan untuk percadangan kawasan konservasi, melakukan rehabilitasi terumbu karang dan melakukan pemasangan terumbu karang buatan serta aplikasi teknologi pengkayaan sumberdaya ikan di laut.

Kawasan pantai di Kota Pasuruan secara umum telah dimanfaatkan secara maksimal bahkan beberapa tahun lalu yang cenderung melebihi batas daya dukung lingkungan, sehingga menimbulkan berbagai kendala. Hal tersebut menyebabkan kegiatan budidaya ikan atau udang di tambak belum dapat memberikan hasil yang optimal. Usaha budidaya di tambak saat ini mencapai luasan 4.604,69 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Kegagalan usaha budidaya udang beberapa dekade ini selain karena faktor lingkungan juga diakibatkan semakin sulitnya untuk mendapatkan benih dan induk udang yang berkualitas baik. Selain itu berjangkitnya beberapa penyakit dan serangan hama juga semakin memperparah keadaan yang sampai saat ini masih terus dilakukan upaya untuk mencari solusi guna mengatasi serangan penyakit. Komoditi budidaya tambak selain udang seperti bandeng masih dapat bertahan. Oleh karena itu, banyak pembudidaya tambak yang beralih ke budidaya bandeng atau melakukan mix culture. Hal ini dilakukan untuk mensiasati kendala

penurunan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kegagalan budidaya udang windu.

Kondisi potensi sumberdaya perikanan laut yang mengalami penurunan juga terdapat di Lekok kabupaten Pasuruan. Penyebab turunya potensi sumberdaya perikanan laut di Lekok adalah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti bom dan potasium yang digunakan untuk menangkap ikan dan dampak yang ditimbulkan baru terasa saat ini ketika nelayan merasa potensi sumberdaya perikanan menurun. Sektor usaha penangkapan ikan tergolong tradisional, dimana armada penangkapan yang dominan terdiri atas perahu motor dengan jumlah 100 hingga 625 armada yang mendarat tiap bulanya. Setiap hasil tangkapan akan dilabuhkan di PPI untuk ditimbang kemudian dijual ke tengkulak. Produksi tangkapan mengalami jumlah penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan naiknya harga bbm sehingga para juragan yang sehari mengoperasikan 5 perahu dikurangi menjadi hanya 3 perahu yang dioperasikan dalam sehari.

Sub sektor perikanan di Kecamatan Lekok meliputi kegiatan perikanan tangkap, tambak, dan kolam. Kegiatan perikanan di Kecamatan Lekok dilaksanakan di kawasan Proyek, karena di wilayah ini terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Hasil tangkapan para nelayan akan didaratkan di sini untuk ditimbang. Pengelolaan kawasan ini diserahkan kepada Badan Pengelola Pangkalan Ikan (BPPI).

Usaha garam juga menguntungkan di Kota Pasuruan dimana potensi tambak garam dari hasil pemetaan tahun 2016 sebesar 803,45 Ha yang berada di Kecamatan dengan jumlah petani garam sebanyak 204 orang dengan lahan produksi seluas 244,73 Ha dan jumlah produksi garam 8.096 ton. Saat ini pemerintah pusat juga sedang berupaya untuk mengembangkan usaha garam rakyat melalui program pemberdayaan usaha garam dan menuju swasembada garam nasional. Mengingat usaha pengolahan garam rakyat sangat dipengaruhi oleh cuaca maka perlu adanya intensifikasi usaha garam melalui paket teknologi yang lebih produktif seperti teknologi saluran ulir dan sistem terpal. Dengan pemakaian kedua teknologi tersebut diharapkan waktu pembuatan garam menjadi lebih singkat dengan kualitas baik sehingga dapat memaksimalkan pengaruh cuaca yang kadang berubahannya tidak menentu. Menjamin kebutuhan konsumsi garam dan pemasaran garam rakyat maka dikembangkan Unit Pengolah Garam (UPG) yang dikelola oleh kelompok yang mengolah garam krosok menjadi garam konsumsi yang dikemas dan siap dipasarkan.

Kondisi wilayah pesisir Kota Pasuruan selain terdapat tambak air payau terdapat juga kawasan hutan bakau (mangrove) yang berfungsi sebagai daerah penyangga dengan kondisi yang berbeda-beda disetiap lokasinya. Pemulihan sumberdaya mangrove melalui penanaman kembali sudah berjalan dengan baik walaupun dalam pengelolaanya masih belum optimal.

Budidaya ikan di air tawar atau kolam sudah mulai berkembang, sampai sekarang luas kolam ikan telah mencapai kurang lebih 48,71 Ha yang tersebar di empat kecamatan. Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila, gurami. Akhir-akhir ini mulai dikembangkan jenis ikan patin dan bawal tawar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dengan teknologi budidaya yang relatif mudah. Udang galah juga merupakan alternatif komoditas budidaya dan sudah menjalin pola kemitraan dengan pengusaha restoran tetapi dalam perkembangannya masih menemui kendala dalam mendapatkan benihnya.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan di beberapa tempat mulai banyak terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih pembudidaya ikan. Namun demikian benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik dalam daerah maupun di luar daerah. Diversifikasi usaha juga telah dilakukan oleh pembudidaya ikan yaitu mengembangkan budidaya berbagai jenis ikan hias.

Pada dasarnya perairan umum belum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan secara optimum. Luas budidaya di karamba jaring apung saat ini mencapai 4,1 Ha. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah nila, patin dan bawal. Hasil yang diperoleh pembudidaya ikan karamba dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Saat ini penambahan unit karamba jaring apung idkendalikan dengan cukup ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan daya dukung lingkungan sebagai tempat pariwisata maupun kegiatan usaha perikanan, sehingga kepada para pembudidaya ikan karamba jaring disarankan untuk melakukan intensifikasi usaha dan diversifikasi komoditi sebagai langkah peningkatan usahanya.

Usaha budidaya ikan di laut diarahkan pada aplikasi teknologi terapan untuk beberapa komoditi yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai potensi yang ada. Namun sampai sekarang pengembangan budidaya ikan di laut masih menjumpai beberapa kendala, diantaranya faktor keamanan. Usaha pengolahan ikan yang terdapat di wilayah Kota Pasuruan terdiri dari usaha pengolahan ikan tradisional sebanyak kurang lebih 1.411 RTP, pedagang ikan sebanyak kurang lebih 701 RTP, pedagang non konsumsi kurang lebih 42 RTP dan modern sebanyak 26 unit perusahaan. Hasil pengolahan ikan tradisional meliputi pemindangan, pengeringan atau pengasinana, pengasapan, pembuatan terasi, pengesan. Sedangkan

unit usaha pengolahan yang modern meliputi pengalengan, pembekuan (coldstorage), pembuatan krupuk ikan atau udang dan frozen foods.

b. Pemberdayaan Nelayan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dwi Walojo, Johan Silas, Haryi Sulistiyarso (2010) dengan judul konsep penataan kawasan permukiman nelayan Kota Pasuruan sebagai dampak pengembangan Kota Pasuruan, hasil analisis memperlihatkan kondisi sosial dan ekonomi nelayan masih mengalami ketinggalan, serta terdapat kendala permodalan, pengolahan dan pemasaran ikan yang mengindikasikan pengaruh positif kekuatan-kekuatan dinamis Kota Pasuruan tidak maksimal di kawasan ini. Konsep penataan yang perlu dilakukan adalah melalui revitalisasi usaha perikanan sebagai pengembangan ekonomi mandiri dan penataan prasarana dan sarana dasar permukiman. Temuan dari penelitian adalah terdapat aspek sosial dan ekonomi yang menjadi indikator kekuatan-kekuatan dinamis Kota Pasuruan belum sepenuhnya mampu memberi pengaruh positif yang maksimal pada kawasan permukiman nelayan yang merupakan nelayan pekerjaan sebagian besar nelayan pekerja yang merupakan nelayan, penghasilan sebagian besar berpendapatan di bawah UMK Kota Pasuruan, modal kerja lebih banyak yang memanfaatkan pinjaman dari tengkulak daripada kredit bank, pemasaran hasil sebagian besar menjual langsung kepada tengkulak, pengobatan, dipuskesmas pembantu dan bidan desa/kelurahan,

tempat belanja kebutuhan kerja di lingkungan wilayah pesisir Kota Pasuruan dan mendapatkan harga dan kualitas barang yang tidak yang tidak bersaing, dan pendidikan di lingkungan Kelurahan yang merupakan pendidikan rendah.

Luas perairan Kota Pasuruan adalah 19.536,02 km² atau 76% dari luas wilayah keseluruhan, mengandung berbagai sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis penting. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan standing stock perikanan sebesar 89.865,69 ton/tahun, potensi lestari maximum sustainable yield (msy) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebesar 26.946,41 ton/tahun. Perikanan di Kota Pasuruan merupakan daerah sebaran jenis ikan pelagis dan komersial yang mempunyai nilai ekonomis penting.

Kekayaan sumberdaya ikan di Kota Pasuruan tersebut, masyarakat pesisir mayoritas menjadi nelayan. Pendapatan kotor nelayan dari hasil melaut sebesar Rp 75.000 hingga 100.000 per hari. Setelah pendapat tersebut dikurangi total biaya operasional, sisanya dibagi dua antara pemilik perahu dengan buruh nelayan. Rata-rata biaya operasional per hari Rp 35.000 sehingga rata-rata pendapatan bersih untuk nelayan maupun untuk buruh nelayan per hari sebesar kurang lebih Rp. 40.000.

Secara umum, nelayan di Kota Pasuruan dapat digolongkan sebagai nelayan *post-tradisional (post-peasant fisher)*. Hal ini dapat dilihat dari armada penangkapan yang dominan terdiri atas perahu motor yang dapat dibilang minim yaitu berjumlah 100 sampai 625 armada.

Disamping itu ketergantungan terhadap musim memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan untuk melaut, jangkauan daerah penangkapan dan hasil tangkapan, serta alokasi hasil penangkapan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri.

Tingkat pendidikan merupakan suatu gambaran secara umum untuk melihat kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada umumnya masyarakat pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi rendah dan relatif sederhana. Pendidikan formal yang diterima masyarakat pesisir secara umum jauh lebih rendah dari pendidikan masyarakat non pantai lainnya. Berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, Rahardjo (1996:86) menyatakan bahwa masyarakat pesisir dapat dibedakan secara jelas dari masyarakat kota, perbedaan utamanya karena keadaan sosial ekonomi mereka yang umumnya terbelakang. Seperti terlihat dari beberapa indikator, misalnya pendapatan yang relatif rendah, kurangnya kelembagaan penunjang. Lemahnya infrastruktur (sosial, fisik, ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan dan status kesehatan.

Menurut Boeke dalam Mintaroem (2008:9) masyarakat desa tradisional mampu membangun dan mengembangkan struktur ekonomi secara otonom dan swasembada karena didukung oleh adanya ikatan-ikatan sosial dan budaya yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian yang semata-mata untuk keperluan keluarga

pengekan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak didasarkan pada motif-motif murni ekonomi yang sangat berorientasi kepada pasar dan laba (non profit oriented). Sehubungan dengan hal tersebut maka pekerjaan tidak dipandang sebagai sarana pengabdian terhadap kewajiban moral, sosial, etika dan keagamaan atau hanya sebatas sebagai upaya untuk mempertahankan hidup.

Konsep pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan secara umum dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan internal secara sinergis akan menentukan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), kemudian lingkungan eksternal secara sinergis akan menentukan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang akan dihadapi masyarakat nelayan.

Hasil analisis situasi dengan pendekatan secara komprehensif dari berbagai aspek yang berpengaruh penting terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal strategis (peluang dan ancaman), berdasarkan hasil survei, diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari lingkungan masyarakat nelayan yakni:

Tabel 7. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal	Kekuatan: 1. potensi sumberdaya perikanan tangkap	Kelemahan: 1. keterampilan dan penguasaan teknologi
-----------------	--	--

	<p>yang besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. semangat kerja tinggi 3. tegar dalam menghadapi kesulitan hidup 	<p>masih kurang</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. jiwa enterpreneur rendah. <p>Posisi tawar terhadap pedagang pengepul rendah.</p>
Faktor eksternal	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permintaan hasil produksi ikan tinggi 2. tersedianya fasilitas kredit bagi nelayan 3. lokasi penangkapan (fishing ground) dekat dan luas 4. tenaga kerja murah 5. kualitas perairan yang cukup baik. 	<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan destruktif 2. harga pasar ditentukan oleh pihak pengepul 3. harga BBM tinggi 4. penangkapan ikan tergantung musim 5. hasil produksi berfluktuasi

Perumusan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dilakukan menggunakan analisis SWOT dengan berdasarkan pada faktor-faktor lingkungan strategis. Alternatif-alternatif strategi yang merupakan rumusan rencana strategi (renstra) pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Hasil *generating* dari matriks SWOT disampaikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Strategi Pemberdayaan Nelayan Kota Pasuruan

S	SO	WO
T	1. sosialisasi fasilitas	1. pengenalan

R A T E G I	<p>kredit yang lebih intensif terhadap nelayan.</p> <p>2. intervensi pasar (membuka peluang pasar) oleh pemerintah dan instansi terkait.</p>	<p>teknologi tepat guna kepada nelayan.</p> <p>2. pengembangan diversifikasi usaha pengolahan ikan</p>
	<p>ST</p> <p>1. mengembangkan pengalaman laut oleh aparat keamanan.</p> <p>2. deregulasi distribusi BBM khusus untuk nelayan.</p>	<p>WT</p> <p>1. subsidi harga BBM bagi nelayan.</p> <p>2. regulasi untuk mencegah penangkapan ikan destruktif melalui aturan adat.</p>

Hasil analisis strategi pemberdayaan nelayan dapat terumuskan strategi pemberdayaan nelayan. Kemudian dirumuskan beberapa program strategis untuk penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan peran kelembagaan, peningkatan produktivitas nelayan, konservasi sumberdaya ikan. Sumberdaya perikanan yang ada di Kota Pasuruan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekitarnya. Hasil identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan nelayan antara lain nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan skala kecil, selain itu pengetahuan keterampilan juga masih terbatas. Khusus untuk buruh nelayan ditemukan bahwa nelayan belum mampu membeli perahu dan peralatan tangkap sendiri.

Salah satu penyebab adalah akses terhadap lembaga keuangan seperti bank sangat rendah padahal hampir sebagian besar tangkap di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Charles, et al (2008:89) mengemukakan bahwa kegiatan perikanan Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, baik oleh nelayan penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari statistik perikanan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa dari 412.497 unit armada perikanan yang digunakan oleh seluruh nelayan di Indonesia sekitar 99,9% merupakan perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor yang berukuran di bawah 5 GT. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2006 mencapai hampir 49 juta unit dari angka tersebut 13% yang mampu mengakses perbankan sedangkan 49,8% mengandalkan modal sendiri.

Persoalan yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian pinjaman adalah kepercayaan lembaga-lembaga keuangan seperti bank kepada masyarakat kecil sangat rendah, karena selama ini fasilitas pinjaman pada lembaga-lembaga keuangan seperti bank hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas dan juga banyak fakta terjadi kegagalan pengembalian pinjaman yang diberikan bagi masyarakat kecil, oleh karena itu pembinaan adalah kata kunci,

membangun pemberdayaan masyarakat adalah cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat.

Somodiningrat (1999:23) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan nelayan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi berdaya. Kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau memberdayakan untuk menerapkan apa yang menjadi pilihan mereka.

Program-program prioritas dalam upaya peningkatan produktivitas nelayan antara lain kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan, membuka tabungan khusus untuk buruh nelayan, dan optimalisasi fungsi dan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit pemilikan kapal bagi buruh nelayan merupakan prioritas program dalam upaya pemberdayaan nelayan. Secara umum, jumlah pendapatan nelayan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang besar. Diketahui pendapatan Rp.900.000 perbulan sedangkan pengeluaran sebesar Rp.700.000 per bulan sehingga masih terdapat selisih pendapatan sebesar Rp. 200.000

per bulan. Pendapatan bersih Rp.200.000, tidak semua nelayan memiliki tabungan di bank maupun lembaga keuangan mikro yang ada di lingkungan sekitar nelayan. Oleh karena itu, selisih pendapatan tersebut memiliki nilai tambah yang optimal, maka program utama yang perlu dilaksanakan adalah memberikan kredit khususnya kepada para buruh nelayan agar memiliki kapal sendiri, sehingga selisih pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mengansur pembayarannya. Selain itu memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada para nelayan agar mau membuka rekening tabungan agar selisih pendapatan tersebut lebih aman dan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bunga terhadap masyarakat nelayan. Dengan demikian, diharapkan produktivitas nelayan bisa meningkat.

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Disamping itu kurangnya, kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan budaya, dan gaya hidup cenderung boros, menyebabkan masyarakat pesisir semakin lemah.

Minimnya pekerjaan alternatif bagi masyarakat ditunjukkan oleh masih sempitnya akses perekonomian dari sektor non-pertanian, dalam hal ini mayoritas hanya bisa menggantungkan perekonomiannya dari hasil tangkapan laut. Meskipun demikian, suatu wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang terbatas, namun apabila didukung oleh

sumberdaya manusia yang menguasai keterampilan dan teknologi, maka sumberdaya alam itu dapat dikelola secara baik untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Jika digunakan teknologi untuk mengelola sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah tersebut, secara tidak langsung telah terbuka lapangan kerja bagi masyarakat daerah itu

Terdapat juga penggolongan nelayan berdasarkan stratifikasi masyarakat nelayan. Pertama nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga memperkerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri harus ikut bekerja. Kedua nelayan kaya B, yaitu nelayan yang mempunyai kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal. Ketiga Nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa memperkerjakan tenaga dari keluarga. Keempat nelayan miskin, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan mencari pekerjaan alternatif lain. Kelima nelayan pandega, yaitu menyewa perahu dan tidak memiliki pekerjaan lain sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi.

Peningkatan peran kelembagaan lokal untuk pemberdayaan nelayan, maka terdapat dua prioritas program yang dilaksanakan yaitu membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan dan kedua adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan. Belum terdapat kelompok usaha bersama yang lahir dari nelayan sendiri.

Hubungan kerja yang terjadi saat ini adalah hubungan antara atasan dengan bawahan atau pemilik perahu dengan buruh nelayan yang dengan sistem bagi hasil. Penghasilan yang diperoleh ketika buruh nelayan melaut, ketika buruh nelayan tidak melaut maka pemilik perahu tidak mendapatkan penghasilan.

Pendidikan bisa sangat mempengaruhi pola pikir nelayan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini terkait tingkat adopsi teknologi yang akan diterapkan dalam menangani hasil tangkapan laut. Pada sisi lain ikan hasil tangkapan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan makanan lain, hal itu disebabkan oleh adanya bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, masyarakat pesisir hanya mengandalkan boks es untuk mengawetkan hasil tangkapannya. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengusahaan nelayan terhadap teknologi.

Membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan merupakan upaya yang paling realistis bagi istri-istri nelayan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Melakukan usaha bersama merupakan pekerjaan untuk membantu menambah penghasilan keluarga nelayan, akan tetapi pekerjaan mengurus keluarga tetap menjadi prioritas utama dalam rumah tangga. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan secara berkelompok antara lain mengolah pangan dengan bahan dasar ikan.

Memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan kepada para anggota kelompok merupakan pemberian modal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha. Sebab modal dalam melakukan usaha tidak hanya dalam bentuk uang semata, tetapi harus diberikan keterampilan mengenai jenis usaha yang akan nelayan lakukan. Tanpa adanya keterampilan dari masing-masing anggota kelompok, maka kegiatan usaha yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Adapun jenis pelatihan yang akan diberikan sangat tergantung pada minat dari masing-masing anggota dan ketersediaan sumberdaya alam yang ada disekitar tempat tinggal nelayan.

c. Pengawasan dan Pengendalian Secara Periodik terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan penelitian pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan menjadi upaya konservasi sumberdaya ikan, terdapat empat alternatif strategi pemberdayaan nelayan yakni pembangunan pos jaga, melakukan patroli rutin, menambah armada patrol pengamanan laut, dan melarang penangkapan ikan dengan bahan peledak. Disamping hal tersebut, memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga sumberdaya perikanan dan kelautan di perairan Kota Pasuruan secara optimal, mengajak masyarakat pemanfaat sumberdaya perikanan dan kelautan untuk bersama-sama mengoptimalkan pengendalian, pengawasan, pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan di Kota Pasuruan. Memberikan informasi tentang tata cara pengurusan perijinan usaha penangkapan, memberikan informasi tentang Undang-undang beserta sanksi yang berkenaan dengan usaha perikanan serta memberikan informasi tentang kewenangan wilayah serta jalur-jalur penangkapan ikan. Bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi sosialisasi mengenai pengelolaan sumberdaya laut maupun mengenai konservasi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan harapan nelayan ikut berpartisipasi dalam menjaga sumberdaya laut disamping melakukan aktivitas menjadi nelayan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Masyarakat nelayan yang sampai saat ini menjadi masyarakat yang marjinal, miskin, dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun secara politik. Nelayan yang melakukan penangkapan (budidaya) di laut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut (Tarigan, 2000:37). Berdasarkan temuan penelitian penangkapan budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, sungai tidak termasuk nelayan. Selanjutnya menurut Tarigan (2000:38) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilihat dari faktor internal pertumbuhan penduduk, kualitas sumberdaya manusia (nelayan), modal usaha. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari dominasi pengelolaan ikan atau proses produksi oleh tengkulak dan sifat pemasaran

produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopsoni (Kusnadi, 2003:26).

Berdasarkan temuan penelitian faktor internal yang mempengaruhi strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan pertumbuhan penduduk wilayah pesisir yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang beragam, hanya mengandalkan pekerjaan melaut atau mencari ikan sehingga tidak mendapatkan pendapatan yang banyak karena bergantung pada alam atau hasil melaut. Kedua kualitas sumberdaya manusia dimana merupakan nelayan yang rata-rata memiliki pendidikan rendah, hanya memiliki pola fikir bahwa mencari pekerjaan untuk makan sehari-hari tanpa adanya niat untuk menabung atau mencari alternatif pekerjaan dalam memanfaatkan hasil olahan laut yang beragam. Ketiga modal usaha yang dimiliki oleh nelayan tidak besar dimana antara nelayan dan buruh nelayan membagi hasil laut, baik nelayan maupun buruh laut mendapatkan pendapatan kecil sekitar Rp. 10.000 per hari.

Faktor eksternal yang mempengaruhi strategi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan yakni. Pertama, dominasi pengelolaan ikan atau proses produksi oleh tengkulak dimana diketahui proses produksi yang dilakukan oleh tengkulak lebih besar karena pemasaran hingga keluar kota dilakukan oleh tengkulak, dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai kelompok dalam bentuk pasar monopsoni. Kedua, daerah yang berdekatan

dengan wilayah pesisir Kota Pasuruan merupakan tempat yang strategis dalam melakukan budidaya perikanan tambak. Ketiga, potensi sumberdaya perikanan yang besar seharusnya dapat menjadi kesempatan yang diimbangi dengan permintaan hasil produksi ikan tinggi.